

# DETEKSI ILUSI FISKAL PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008-2013

Yesdi Christian Calvin dan Lia Yuliana

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - Jakarta  
E-mail: yesdicalvin@rocketmail.com, lia@stis.ac.id

**Abstrak:** Pelaksanaan otonomi daerah sudah lebih dari satu dekade, namun belum mampu membuat daerah mandiri secara finansial. Ketidakmampuan daerah secara finansial memunculkan banyak perilaku tidak wajar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Transfer seperti dana perimbangan menimbulkan ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga perilaku belanja daerah yang menyesuaikan pada besarnya transfer. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan Indeks Kapasitas Fiskal paling rendah yang berarti kemampuan keuangannya paling rendah di Indonesia. Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* yang mengatakan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung lebih distimulasi oleh peningkatan penerimaan dana transfer daripada peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* pada keuangan daerah Kabupaten/Kota di NTT. Penelitian menggunakan metode eksplanasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Regresi Data Panel. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan, elastisitas Belanja Daerah terhadap Transfer Tidak Bersyarat (TTB) lebih besar daripada terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* pada keuangan Kabupaten/Kota di NTT.

Kata Kunci: ilusi fiskal, belanja, ttb, pad, regresi data panel.

*Abstract:* The implementation of regional autonomy has been implemented more than a decade, but has not been able to make the region self-sufficient financially. The inability of the financial area gave rise to a lot of unnatural behavior of local government in financial management. Equalization fund transfer as a financial dependence raises the area towards the Centre government, not only in terms of the number of shopping behavior but also the area that adjusts on the magnitude of the transfer. East Nusa Tenggara (NTT) is the province with the lowest Fiscal Capacity Index which means the lowest financial capability in Indonesia. Fiscal illusion *Flypaper Effect* hypothesis which says that an increase in shopping areas tend to be more stimulated by the increased acceptance of funds transfer than original income increase in the area. The purpose of this research is to know the existence of Fiscal Illusion hypothesis *Flypaper Effect* on regional financial district/town in NTT. The method used empirical research. The processing techniques and data analysis using Regression Data Panel. It can be concluded that based on the resulting regression equation, the elasticity of regional expenditure on Transfer Unconditional (TTB) is greater than against region income. These conditions indicate the existence of Fiscal Illusion Hypothesis *flypaper* on the financial districts / municipalities in NTT.

*Key words:* fiscal illusion, shopping, ttb, pad, panel data regression.

## PENDAHULUAN

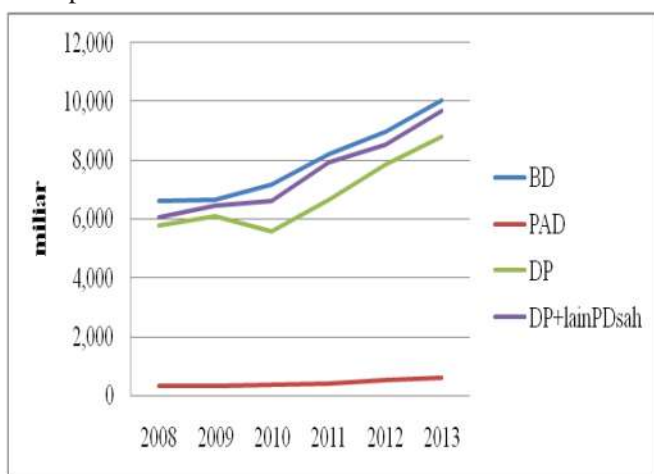
Latar belakang penelitian ini dalam konteks otonomi daerah, dimana kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu. Menurut Abdul Halim (2001) bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan utama. Namun kemandirian

keuangan masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Banyaknya daerah yang belum mandiri secara keuangan menggambarkan ketidakmampuan daerah melaksanakan otonomi. Ketidakmandirian keuangan terjadi salah satunya karena potensi daerah yang rendah dari aspek sumber pendapatan sendiri yang tergambar dari Indeks Kapasitas Fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah akan menerima dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar sehingga menimbulkan tingginya ketergantungan daerah pada transfer dari pusat.

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, Kabupaten/Kota sebagai fokus pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh mengalami masalah kemampuan keuangan.

Lebih dari separuh jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang rendah yaitu 54 persen atau sebanyak 264 Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat 21 persen yang berkapasitas fiskal sedang, sisanya 15 persen berkapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang rendah.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang memiliki indeks kapasitas fiskal paling rendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,1103. Hampir semua Kabupaten/Kota di NTT memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Hanya kabupaten Ngada yang memiliki kapasitas fiskal sedang yaitu sebesar 0,5667. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan atau kemandirian keuangan daerah NTT baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota masih rendah.



**Gambar 1.** Perkembangan total belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana perimbangan ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah seluruh Kabupaten/Kota di NTT tahun 2008-2013  
Sumber: BPS (diolah)

Seperti terlihat pada Gambar 1 bahwa pada periode tahun 2008-2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah (BD) seluruh Kabupaten/Kota di NTT mengalami peningkatan. Namun terlihat bahwa laju peningkatan PAD dari tahun ke tahun lebih kecil dibandingkan laju peningkatan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Belanja Daerah tidak mendorong tingginya laju PAD.

Secara proporsi, bahwa pendapatan daerah NTT lebih didominasi oleh Dana Perimbangan dibandingkan PAD. Selain itu, perkembangan pada Belanja Daerah memiliki pola yang lebih mirip dengan perkembangan transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Pola ini semakin mirip ketika Dana Perimbangan digabung dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (DP+LainPDSah) yang merupakan salah satu bentuk transfer dari pihak ekstern (terutama pemerintah pusat). Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan terdapat kecenderungan perilaku Belanja Daerah yang tergantung pada besarnya transfer dari pemerintah pusat. Kecenderungan berbagai kategori transfer untuk meningkatkan belanja publik lebih dari peningkatan yang setara dalam pendapatan dari sumber lain disebut Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* (Dougan dan Kenyon, 1988). Hal ini selaras dengan Darwanto dan Yustikasari Yulia (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima sehingga memungkinkan terjadinya respons yang non-linier dan asimetris. Ketika pemerintah daerah merespons (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri atau dengan kata lain stimulus terhadap belanja daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam PAD, dapat dikatakan terjadi Ilusi Fiskal dalam keuangan pemerintah daerah (Oates, 1999).

Penelitian ini meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT pada periode 2008-2013. Penentuan periode 2008-2013 mempertimbangkan konsep Bappenas (2007) bahwa evaluasi terhadap pemekaran wilayah baru layak dilakukan setelah 5 tahun daerah dibentuk. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota yang diteliti sebanyak 16 daerah yang minimal sudah 5 tahun berdiri sejak tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di NTT periode 2008-2013, serta

mengetahui elastisitas Belanja Daerah terhadap PAD, Transfer Bersyarat, Transfer Tidak Bersyarat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat mengindikasikan terjadinya Ilusi Fiskal pada keuangan daerah Kabupaten/Kota di NTT periode 2008-2013.

Pada penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis hasil penghitungan rasio APBD. Indikator-indikator kinerja tersebut dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung keberadaan perilaku pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan adanya Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect*.

Rumus untuk menghitung rasio-rasio tersebut, yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Lain Pendapatan Daerah Sah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi } X_t - \text{Realisasi } X_{t-1}}{\text{Realisasi } X_{t-1}} \times 100\%$$

dengan X: Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah.

Teori yang menjelaskan kondisi tersebut adalah Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* yang mengatakan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung lebih distimulasi oleh peningkatan penerimaan dana transfer daripada peningkatan pendapatan asli daerah.

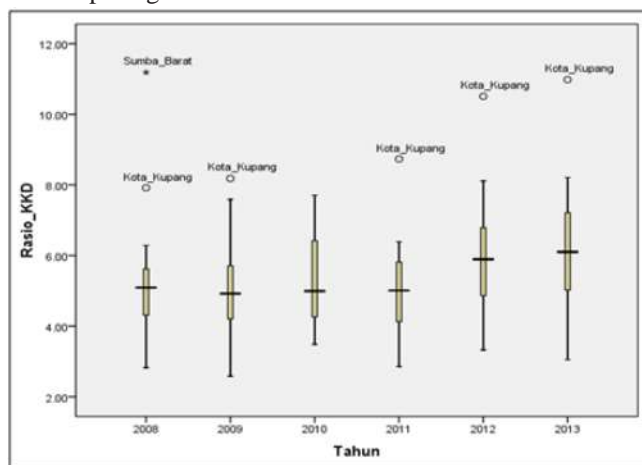
Untuk mendeteksi Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* dibangun model dengan menggunakan Regresi Data Panel. Variabel-variabel yang dimasukkan dalam model meliputi variabel terikat yaitu Belanja Daerah dan variabel-variabel bebas yaitu PAD untuk mewakili pendapatan pribadi daerah, komponen Dana Perimbangan yaitu Transfer Bersyarat/TB (DAK) dan Transfer Tidak Bersyarat/TTB (DAU digabung DBH), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) untuk mewakili

pendapatan dari transfer oleh pemerintah luar terutama pusat. Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* terdeteksi apabila elastisitas Belanja Daerah terhadap salah satu dari TB, TTB, dan LPDS yang terlihat dari *slope regressor* lebih besar daripada terhadap PAD.

## PEMBAHASAN

### Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Abdul Halim, 2007). Gambar 2 menunjukkan bahwa kemandirian seluruh Kabupaten/Kota di NTT pada 2008-2013 selalu berkategori rendah sekali. Hal ini terlihat dari Rasio Kemandirian Keuangan tiap Kabupaten/Kota yang tidak pernah lebih dari 12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di NTT masih sangat rendah sehingga dapat dikatakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 seperti terlihat pada gambar 2 berikut:

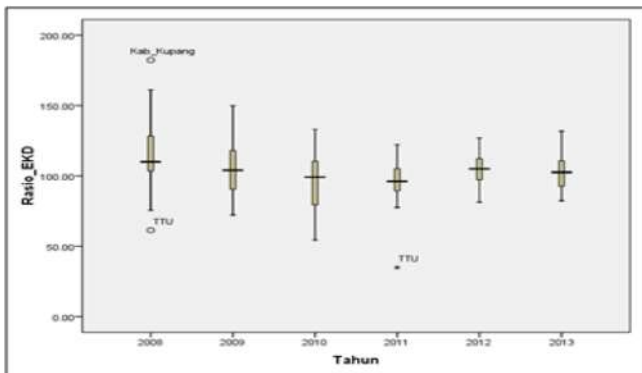


**Gambar 2.** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (EKD)

Keseluruhan Kabupaten/Kota di NTT mampu dengan baik merealisasikan PAD. Hal ini terlihat dari median rasio EKD yang selalu lebih besar dari 95%, yang berarti

minimal mampu secara efektif. Namun satu hal yang perlu diperhatikan yaitu *trend* yang terbentuk dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari perubahannya, efektivitas keuangan Kabupaten/Kota di NTT mengalami *trend* penurunan. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (EKD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 seperti terlihat pada gambar 3 berikut:

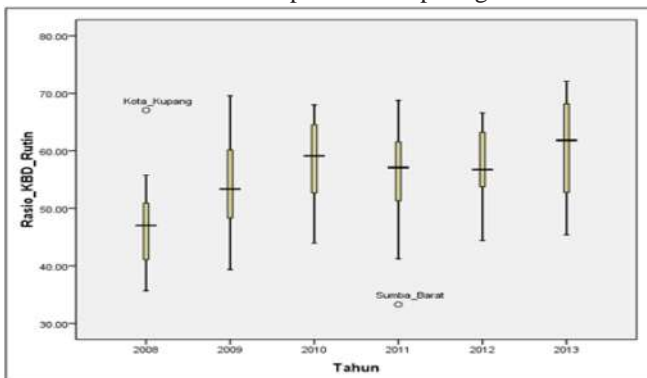


**Gambar 3.** Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (EKD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

### Rasio Keserasian Belanja Daerah (KBD)

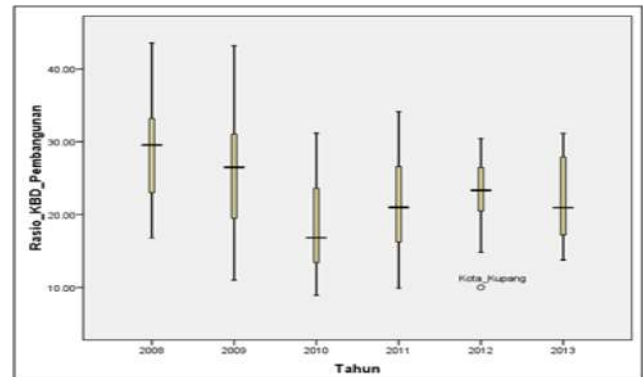
Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim,2012).

Rasio Keserasian BelanjaRutin (KBD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 seperti terlihat pada gambar 4 berikut:



**Gambar 4.** Rasio Keserasian BelanjaRutin (KBD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota diNTT Tahun2008-2013 terlihat pada gambar 5 berikut:



**Gambar 5.** Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota diNTT Tahun2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

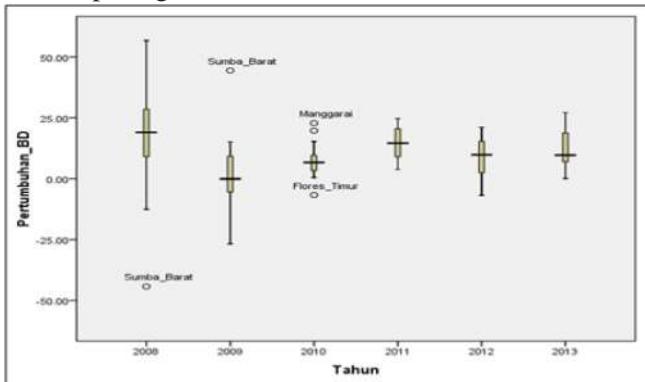
Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ketidakserasian antara pengalokasian belanja untuk aspek yang bersifat rutin dan pembangunan. Dari tahun ke tahun, pemerintah daerah meningkatkan pengeluarannya untuk belanja rutin dan mengurangi belanja pembangunan. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio belanja rutin tiap tahun yang lebih besar dari 50% kecuali pada 2008. Selain itu juga terlihat bahwa hampir setiap tahun terjadi peningkatan pengeluaran untuk belanja rutin sehingga membentuk *trend* peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di NTT cenderung tidak berorientasi pada pembangunan melalui kebijakan-kebijakannya. Padahal meningkatnya belanja pembangunan dapat mendorong peningkatan PAD.

### Pertumbuhan Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten/Kota di NTT mengalami perubahan yang fluktuatif selama 2008-2013. Ini terlihat dari mediannya yang mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang periode tersebut. Namun secara keseluruhan, pertumbuhan belanja daerah masih bernilai positif yang berarti setiap tahun pemerintah Kabupaten/Kota di NTT merealisasikan belanja daerah yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013



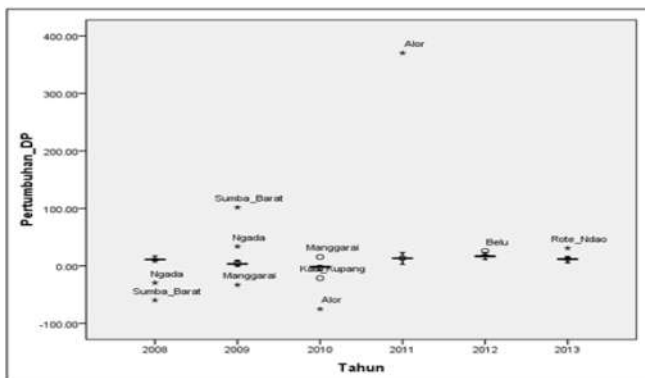
terlihat pada gambar 6 berikut:



**Gambar 6.** Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

### Pertumbuhan Dana Perimbangan

Secara keseluruhan, pertumbuhan Dana Perimbangan berarah positif terutama untuk 3 tahun terakhir yaitu 2011-2013 dengan tidak adanya daerah dengan pertumbuhan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan ketergantungan keuangan Kabupaten/Kota di NTT terhadap dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian kategori kemandirian yang lebih baik dalam aspek keuangan bagi Kabupaten/Kota di NTT. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 terlihat pada gambar 7 berikut:

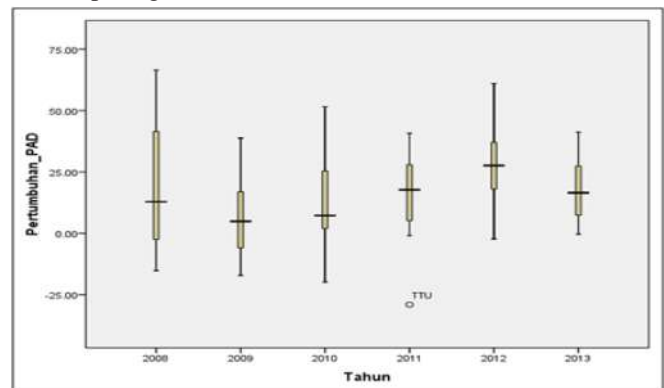


**Gambar 7.** Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

### Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada setiap tahunnya terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan PAD, yang berarti bahwa terdapat daerah yang mengalami penurunan kinerja dalam

pengumpulan pendapatan pribadi. Hal ini terlihat dari nilai minimum pertumbuhan PAD yang negatif pada tiap tahun. Pada tahun 2008-2013 jumlah pertumbuhan negatif PAD juga lebih banyak dibandingkan jumlah pertumbuhan negatif Belanja Daerah dan Dana Perimbangan. Hal ini otomatis memengaruhi pemerintah daerah untuk lebih banyak menggunakan Dana Perimbangan daripada PAD untuk menunjang Belanja Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013 terlihat pada gambar 8 berikut:



**Gambar 8.** Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2008-2013  
Sumber : BPS (diolah)

### Pengaruh Variabel-Variabel Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pengolahan untuk regresi data panel, dihasilkan persamaan *Fixed Effect Model* dengan struktur Varians-Kovarians bersifat Heteroskedastik dan tidak terdapat *Cross Sectional Correlation* sebagai berikut:  
$$\ln BD_{it} = 7,592 - 0,152 D_{2i} + 0,0158 D_{3i} + \dots - 0,055 D_{16i} + 0,243 \ln PAD_{it} + 0,069 \ln TB_{it} + 0,295 \ln TTB_{it} + LPDS_{it}$$

Koefisien untuk setiap variabel bebas menunjukkan besarnya elastisitas atau besarnya perubahan belanja daerah terhadap perubahan komponen pendapatan daerah. Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 0,24 persen pada belanja daerah tiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Selain itu, tiap perubahan transfer dana perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap perubahan Belanja Daerah. Terlihat bahwa tiap peningkatan 1% pada Transfer Bersyarat

(DAK) menyebabkan peningkatan Belanja daerah sebesar 0,069% dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Perubahan yang lebih besar pada belanja daerah diakibatkan oleh perubahan Transfer Tidak Bersyarat. Tiap peningkatan pada Transfer Tidak Bersyarat sebesar 1% menyebabkan peningkatan pada belanja daerah sebesar 0,29% dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Perubahan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai salah satu bentuk transfer pemerintah luar (terutama pusat) pun menyebabkan perubahan yang signifikan pada Belanja Daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan Belanja Daerah sebesar 0,071% untuk tiap peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas lain konstan.

Koefisien perubahan Transfer Bersyarat diketahui jauh lebih kecil daripada koefisien PAD dan TTB. Hal ini karena Transfer Bersyarat dalam bentuk DAK adalah dana yang alokasinya sudah ditetapkan oleh pusat untuk kepentingan-kepentingan khusus yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak leluasa untuk membelanjakan DAK. Keadaan ini sesuai dengan temuan Slack (1980), yakni pemberian Transfer Tidak Bersyarat kepada daerah akan diiringi oleh kenaikan pengeluaran daerah, tetapi respon terhadap Transfer Bersyarat tidak terlalu tegas. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah juga memiliki koefisien yang jauh lebih kecil daripada koefisien PAD dan TTB karena besarnya yang tidak menentu setiap tahun dan bersifat penyesuaian pada anggaran. Komponen utama penyusun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah bagi hasil provinsi dan dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.

### **Pendeteksian Ilusi Fiskal Hipotesis *Flypaper Effect***

Pelaksanaan otonomi yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, idealnya daerah dapat mencapai kemandirian keuangan untuk menopang aspek finansial daerahnya. Selain mandiri, PAD sebagai wujud kontribusi daerah pada keuangan daerah juga seharusnya memberikan stimulus yang lebih besar dibandingkan transfer pemerintah pusat terhadap perilaku pemerintah daerah dalam

membelanjakan pendapatannya. Namun pada kenyataannya sebagian besar daerah masih mengalami ketidakmandirian keuangan. Kondisi ini membuka cela bagi perilaku belanja daerah yang lebih merespon perubahan pada transfer pemerintah pusat dibandingkan perubahan PAD. Haryo Kuncoro (2007) mengatakan bahwa Ilusi Fiskal dapat terjadi apabila elastisitas pengeluaran terhadap transfer lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu komponen utama penyusun PAD.

Berdasarkan nilai elastisitas yang terlihat dari koefisien tiap variabel bebas dalam persamaan, belanja daerah memiliki elastisitas yang paling besar terhadap Transfer Tidak Bersyarat yaitu sebesar 0,29. Elastisitas ini lebih besar apabila dibandingkan dengan elastisitas Belanja Daerah terhadap PAD yang sebesar 0,24. Ini berarti terdapat kecenderungan perilaku pemerintah Kabupaten/Kota di NTT merespon transfer pemerintah pusat lebih besar dibandingkan PAD melalui belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* pada keuangan Kabupaten/Kota di NTT.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilusi Fiskal dengan hipotesis *Flypaper Effect* terdeteksi pada keuangan Kabupaten/Kota di NTT. Hal ini didukung oleh kemandirian keuangan semua Kabupaten/Kota yang masih tergolong sangat rendah dan secara keseluruhan mengalami penurunan kemampuan merealisasikan PAD meskipun masih tergolong efektif. Nanga (2005) memberikan argumentasi bahwa kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini karena daerah akan mendapatkan pemberian DAU yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah akan cenderung tidak optimal untuk menggali potensi daerah yang dapat menyumbang pada pendapatan daerah. Ini mengakibatkan dari tahun ke tahun, pemerintah daerah mengharapkan transfer dana perimbangan yang lebih besar karena rendahnya pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh lebih banyaknya pertumbuhan negatif pada PAD dibandingkan pertumbuhan negatif pada Dana Perimbangan dan Belanja Daerah (ketergantungan). Selain itu, belanja yang terus meningkat dan tidak serasi antara aspek rutin dan pembangunan menunjukkan adanya pemborosan/ketidakefektifan pada pengalokasian dana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pemerintah Kabupaten/Kota di NTT untuk meningkatkan Belanja Daerah dengan tujuan pada periode berikutnya mendapat transfer dana yang lebih besar.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2008-2013, yaitu: (a) Kemandirian keuangan semua Kabupaten/Kota di NTT masih sangat rendah yang menunjukkan campur tangan pemerintah yang masih sangat dominan dalam pendaanaan urusan daerah, (b) Semua Kabupaten/Kota di NTT digolongkan mampu secara efektif dalam merealisasikan PAD tetapi dengan kecenderungan menurun, (c) Secara keseluruhan pendapatan dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan yang positif sementara dari PAD mengalami pertumbuhan yang positif tetapi tidak stabil. Selain itu, realisasi Belanja Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan memiliki kecenderungan meningkat, (d) Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTT tidak serasi yang ditunjukkan oleh belanja rutin yang jauh lebih dominan dan meningkat dari tahun ke tahun sementara belanja pembangunan menurun dan mendapat porsi yang lebih kecil.

2. Elastisitas Belanja Daerah terhadap Transfer Tidak Bersyarat lebih besar dibandingkan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan stimulasi yang ditimbulkan Transfer Tidak Bersyarat lebih besar daripada PAD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah cenderung menggantungkan pengeluarannya terhadap pendapatan dari transfer pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya Ilusi Fiskal hipotesis *Flypaper Effect* pada keuangan Kabupaten/Kota di NTT periode 2008-2013.

### Saran-saran

1. Sebagai salah satu inovasi dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, perlu dilakukan analisis *Flypaper Effect* oleh suatu lembaga independen secara berkala
2. Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di NTT masih sangat rendah meskipun secara keseluruhan mampu merealisasikan PAD secara efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh potensi sumber PAD di NTT yang memang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah NTT perlu mempromosikan dan mengembangkan sektor-sektor yang bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD. Misalnya, karena NTT merupakan salah satu gerbang pariwisata di Indonesia, objek-objek wisata perlu diperbaiki, dibangun lebih banyak fasilitas seperti hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan yang bisa mengundang banyak wisatawan.
3. Oleh karena terdapat *Flypaper Effect* yang ditimbulkan oleh pemberian dana transfer, pemerintah pusat perlu mengkaji kembali sistem perimbangan keuangan agar pengalokasiannya tepat sasaran. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Transfer Bersyarat pada dana perimbangan sebagai kontrol pada pengeluaran pemerintah daerah.
4. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dalam pengalokasian belanja daerah agar tidak menimbulkan ketidakserasian dan ketidakefektifan dalam pembelanjaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta. 2001.
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta. 2007.
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*. Salemba Empat. Jakarta. 2012.
- Abdul Halim, et.al. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta. 2012.
- Darwanto dan Yustikasari Yulia. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas. Makasar. 2007.
- Dougan, W.R. and Kenyon, D.A.. *Pressure Groups and Public Expenditures: The Flypaper Effect Reconsidered*, Economic Inquiry 26,1998: 159-170.
- Haryo Kuncoro. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*.

- [http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Wilayah-2007.PDF](http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Wilayah-2007.PDF) (Diakses pada 23 April 2015).
- Nanga, Muana. *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2005.
- Oates, Wallace. *An Essay On Fiscal Federalism*. *Journal of Economic Literature* 37 1999: 1120-1149.
- Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,---. *Grand Design Desentralisasi Fiskal*, [pdf] (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/info-utama/203-grand-design-desentralisasi-fiskal>).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2014 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. : Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan*. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
- Slack, Enid. "Local Fiscal Response to Intergovernmental Transfers". *Review of Economics and Statistics* 62 (3)1980: 64-70.